



LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	ASET	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas dalam Rupiah	114,589	117,725
2	Kas dalam Valuta Asing	-	-
3	Surat Berharga Syariah	-	-
4	Penempatan pada bank Lain	363,630,316	34,639,043
	Piutang		
	a. Piutang Murabahah	20,624,050	37,190,075
	b. Piutang Istishna	-	-
	c. Piutang Multijasa	-	-
	d. Piutang Qardh	26,018,860	6,086,942
	e. Piutang Sewa	-	-
6	Pembiayaan Bagi Hasil	-	-
	a. Mudharabah	-	111,000
	b. Musyarakah	56,516,023	53,938,416
	c. Lainnya	-	-
7	Penyertaan Modal	-	-
8	Salam	-	-
9	Aset Istishna dalam Penyelesaian	-	-
	Termin Istishna -/-	-	-
10	Ijarah	-	216,667
11	Persediaan	-	-
12	Agunan yang Diambil Alih	-	-
13	Properti Terbengkalai	-	-
14	Aset Tetap dan Inventaris	9,946,021	9,918,809
	Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	1,899,536	1,471,834
	Aset Tidak Berwujud	108,480	108,480
	Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	108,480	108,480
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	1,034,304	976,539
17	Aset Lainnya	372,220	410,209
	TOTAL ASET	147,020,939	140,180,513
	LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		
1	Liabilitas Segera	538,894	802,403
2	Tabungan Wadiah	200,506	117,807
	Simpanan Mudharabah		
	a. Tabungan Mudharabah	19,605,046	36,974,233
	b. Deposito Mudharabah	45,996,350	46,244,450
4	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-
5	Liabilitas kepada Bank Lain	37,263,656	25,005,156
6	Pembiayaan Diterima	14,500,260	5,000,260
7	Liabilitas Lainnya	1,358,909	2,160,372
8	Dana Syirkah Temporer	-	-
9	Modal Disetor	19,568,370	16,281,600
10	Tambahan Modal Disetor	-	-
	Ekuitas Lain	-	-
	a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam kelompok Tersedia	-	-
	b. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	-	-
	c. Lainnya	-	-
	d. Pajak Penghasilan Terkait Dengan Ekuitas Lain -/-	-	-
	Saldo Laba	-	-
	a. Cadangan Umum	39,467,806	3,331,881
	b. Cadangan Tujuan	390,559	65,491
	c. Belum Ditetapkan tujuan	3,651,609	4,216,860
	TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	147,020,939	140,180,513

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		
1	Penerimaan Dana Zakat yang berasal dari :		
	a. Intern BPRS	116,340	109,838
	b. Ekstern BPRS	95	110
	Total Penerimaan	116,435	109,948
2	Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat		
	a. Lembaga Amil Zakat	70,539	225,375
	b. Badan Amil Zakat	-	-
	Total Penyaluran	70,539	225,375
	Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf		
1	Penerimaan Dana Wakaf yang berasal dari :		
	a. Intern BPRS	-	-
	b. Ekstern BPRS	-	-
	Total Penerimaan	-	-
2	Penyaluran Dana Wakaf kepada Entitas Pengelola Wakaf		
	a. Badan Wakaf Indonesia	-	-
	b. Nadzir Lain*	-	-
	TOTAL PENYALURAN	-	-

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Saldo Awal Dana Kebajikan	70,421	57,995
	Penerimaan Dana Kebajikan		
	a. Infak dan Sedekah	-	-
	b. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
	c. Denda	2,650	12,427
	d. Penerimaan Nonhalal	90,951	-
	e. Lainnya	-	-
	Total Penerimaan	93,601	12,427
	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana Kebajikan Produktif	-	-
	b. Sumbangan	-	-
	c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	35,902	-
	Total Penggunaan	35,902	-
4	Kenaiakan (Penurunan) Dana Kebajikan	57,699	12,427
5	Saldo Akhir Dana Kebajikan	128,120	70,421

LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL

(Dalam Ribuan Rupiah)

JENIS PENGHIMPUNAN DANA	Porsi Pemilik Dana				
	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasikan	Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate Of Return
Liabilitas Kepada Bank Lain	-	-	-	-	-
Tabungan Mudharabah	18,218,600	239,286	13.00	26,201	2.57
Deposito Mudharabah	74,446,350	1,004,060	32.00	342,287	6.34
a. 1 (satu) bulan	10,230,000	134,363	27.00	36,278	5.35
b. 3 (tiga) bulan	19,645,000	258,021	30.00	77,406	5.94
c. 6 (enam) bulan	58,38,200	76,680	33.00	25,304	6.54
d. 12 (dua belas) bulan	40,733,150	534,996	38.00	203,299	7.52
Pembiayaan Diterima	-	-	-	-	-
JUMLAH	94,664,950	1,243,346		368,488	

LAPORAN LABA RUGI PUBLIKASI

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	POS	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Pendapatan Dari Penyaluran Dana	16,889,738	16,808,678
1.	Dari Surat Berharga Syariah	-	-
2.	Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	7,240,808	747,222
3.	Pembiayaan yang di berikan		
	a. Pendapatan Piutang		
	i. Piutang Murabahah	4,485,404	8,505,557
	ii. Piutang Istishna	-	-
	iii. Piutang Multijasa	-	-
	b. Pendapatan Bagi Hasil		
	i. Mudharabah	-	-
	ii. Musyarakah	8,278,667	5,784,324
	c. Pendapatan Sewa	17,875	19,500
	d. Pendapatan Lainnya	3,383,710	1,752,076
4.	Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-	-	-
	Bagi Hasil Untuk Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah dan dana Syirkah Temporer -/-	5,885,962	5,355,828
1.	Simpanan Dana Pembiayaan Mudharabah	5,885,962	5,355,828
2.	Dana Syirkah Temporer	-	-
III.	Pendapatan Setelah distribusi bagi hasil (I-II)	11,003,776	11,452,850
IV.	Pendapatan Operasional Lainnya	1,476,657	2,146,680
	Beban Operasional	7,761,946	8,138,214
1.	Beban Bonus Titipan Wadiah	-	-
2.	Beban Imbalan atas Pembiayaan yang Diterima	-	-
3.	Beban Premi Asuransi dan Penjaminan	249,238	200,827
4.	Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	506,535	1,005,103
5.	Beban Pemasaran	27,437	58,575
6.	Beban Penelitian dan Pengembangan	-	-
7.	Beban Administrasi dan Umum	6,978,736	6,873,709
VI.	Pendapatan dan Beban Nonoperasional	(36,421)	(140,426)
1.	Pendapatan Nonoperasional	1,000	-
2.	Beban Nonoperasional		
	a. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	-	-
	b. Lainnya	37,421	140,426
VII.	Labas Rugi Tahun Berjalan	4,682,066	5,320,889
VIII.	Taksiran Pajak Penghasilan	811,497	994,191
IX.	Pajak Tanggahan	(102,621)	-
X.	Zakat	116,340	109,838
XI.	Labas Rugi Bersih	3,651,609	4,216,860
XII.	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
	Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
	a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	-	-
	b. Lainnya	-	-
	c. Pajak Penghasilan Terkait	-	-
	Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
	a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia	-	-
	b. Lainnya	-	-
	c. Pajak Penghasilan Terkait	-	-
XXI.	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		
XXII.	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-	-

RASIO KEUANGAN

(Dalam Persentase)

No.	JENIS RASIO	Nilai Rasio (%)
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)	41.30
2	Rasio Cadangan terhadap Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)	100.14
3	Non Performing Financing (NPF) Neto	6.25
4	Non Performing Financing (NPF) Gross	6.75
5	Return on Asset (ROA)	3.40
6	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	74.31
7	Net Imbalan (NI)	7.90
8	Financing to Deposit Ratio (FDR)	156.71
9	Cash Ratio	24.79

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	POS	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	TAGIHAN KOMITMEN		
I.	1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	-	-
	2. Lainnya	-	-
	KEWAJIBAN KOMITMEN		
II.	1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik	-	189,000
	2. Lainnya	-	-
	TAGIHAN KONTINJENSI		
III.	1. Jaminan atau Garansi (Kafalah) yang Diterima	-	-
	2. Pendapatan dalam Penyelesaian	1,286,106	475,325
	3. Lainnya	2,893,027	2,436,080
	LAINNYA		
IV.	1. Aset Produktif yang Dihapusbuku		
	a. Aset Produktif	2,991,490	2,768,933
	b. Aset Produktif Dihapusbuku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	75,481	57,491
	2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih	-	-
	3. Penerusan Dana (Channeling)	97,638	97,639

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	ASET	31 Desember 2025					31 Desember 2024						
		L	DPK	KL	D	M	Jumlah	L	DPK	KL	D	M	JUMLAH
1	Surat Berharga Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Model	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Syariah Lain	35,711,322	-	-	-	-	35,711,322	34,444,724	-	-	-	-	34,444,724
	Piutang	39,421,812	1,604,244	504,077	4,003,952	1,108,896	46,642,911	36,529,506	5,326,563	205,597	361,082	854,269	43,277,017
	a. Piutang Murabahah	13,402,951	1,604,244	504,077	4,003,952	1,108,896	20,624,050	30,442,564	5,326,563	205,597	361,082	854,269	37,190,075
	b. Piutang Istishna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Piutang Multijasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Piutang Qardh	26,018,861	-	-	-	-	26,018,861	6,086,942	-	-	-	-	6,086,942
	e. Piutang Sewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembiayaan Bagi Hasil	48,928,236	6,245,778	-	481,162	860,847	56,516,023	50,908,888	2,168,681	-	860,847	111,000	54,049,416
	a. Mudharabah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,000	111,000
	b. Musyarakah	48,928,236	6,245,778	-	481,162	860,847	56,516,023	50,908,888	2,168,681	-	860,847	-	51,769,735
	c. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH ASET PRODUKTIF	124,061,370	7,850,022	504,007	4,485,114	1,969,743	138,870,256	121,883,118	7,495,244	205,597	1,221,929	965,269	131,771,157
	ASET PRODUKTIF KEPADA PIHAK TERKAIT	220,630	-	-	-	-	220,630	277,874	-	-	-	-	227,874

LAPORAN INFORMASI LAINNYA

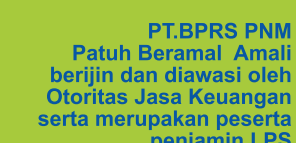
ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS	PEMEMANG SAHAM	STATUS PEMEMANG	ULTIMATE SHAREHOLDERS
DIREKSI	1. PT.Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah (79.68%)	PSP	1. PT PERMODALAN NASIONAL MADANI VENTURA SYARIAH
1. YANUAR ALFAN	2. Anis Mujahid Akbar (4.36%)	Non PSP	2. ANIS MIJAHID AKBAR
DEWAN KOMISARIS	3. H. Abdarab Saleh (3.34%)	Non PSP	3. H. ABDARAB SALEH
1. ANIS MUJAHID AKBAR	4. Yanuar Alfian (1.55%)	Non PSP	4. SITI FITRIATUL HIMMAH
2. SISWO PUJONO	5. Fatimah (1.47%)	Non PSP	5. YANUAR ALFAN
DPS	6. Asraruddin (1.45%)	Non PSP	6. ANDI NURALAM ABDULLAH
1. BOHRI RAHMAN	7. Siti Fitriatul Himmah (1.31%)	Non PSP	7. H.L. SYAIFUL AKHYAR
2. MASTUR	8. Andi Nuralam Abdullah (1.28%)	Non PSP	8. JADID AHMAD
	9. H.L.Syaiful Akhyar (1.14%)	Non PSP	9. NOVI HERAWATI
	10. Lainnya (4.41%)	Non PSP	10. FARID AMIR

Mataram, 31 Desember 2025
Direksi,

(Yanuar Alfian)
Direktur Utama

PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI

CALL CENTER
(0370)7709101
CS : 081-907-721-729



www.bankamali.co.id



@bprspatuhberamal



@bprspatuhberamal

Satgas TMMD Ke-128 Percepat Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

Selong (Suara NTB) -

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 terus menunjukkan progres signifikan, khususnya dalam percepatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kegiatan ini menjadi salah satu fokus utama sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran, Selasa (28/4/2026).

Dengan semangat gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, dan warga setempat, proses renovasi dan pembangunan RTLH berjalan dengan cepat dan efektif. Personel Satgas TMMD bersama masyarakat bahu-membahu menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan, mulai dari pembongkaran hingga tahap finishing.

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke-128 menyampaikan bahwa percepatan pembangunan RTLH ini bertujuan agar masyarakat penerima manfaat dapat segera menikmati hunian yang layak, aman, dan sehat. Selain meningkatkan



PEMBANGUNAN - Program TMMD ke-128 melaksanakan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Selasa (28/4/2026).

kualitas hidup warga, program ini juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian masyarakat dengan rakyat.

Masyarakat penerima bantuan hunian yang layak, aman, dan sehat. Selain meningkatkan



MENEMUI - Bupati Lotim H. Haerul Warisin (tengah) didampingi Sekda Lotim H. M. Juaini Taofik menemui Mensos Saefullah Yusuf (paling kiri), Selasa (28/4).

Temui Mensos Bupati Lotim Sorot Sekolah Rakyat hingga Kepesertaan JKN

Selong (Suara NTB) -

Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) H. M. Juaini Taofik menemui Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, pada Selasa (28/4/2026). Bupati menyortir tiga persoalan mendasar di Kabupaten Lotim mulai dari rencana pembangunan gedung sekolah rakyat hingga soal banyaknya warga Lotim yang dinonaktifkan dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam rilisnya, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Ek Raufan Pradita menjelaskan Bupati Lotim pertama menanyakan soal program Sekolah Rakyat. Bupati Haerul mengungkapkan bahwa program yang sudah berjalan dua tahun di Lotim masih terbentur masalah lahan dan fasilitas. Saat ini, 100 siswa setara SD menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek, sementara 125 siswa setara SMA menumpang di eks Akper Sakra.

Pembak Lotim sudah menyiapkan lahan 5 hektare sesuai informasi awal sebagai lokasi pembangunan gedung sekolah rakyat. Namun kemudian dibutuhkan perluasan 7 hektare. "Bupati tetap berkomitmen untuk keberlangsungan program ini," tegasnya.

Kedua, Bupati melaporkan sebanyak 130.000 warga Lombok Timur dinonaktifkan kepesertaannya. Padahal, Pemda sudah mengucurkan Rp90 miliar di tahun 2026 untuk membayarkan iuran BPJS masyarakat, meningkat dari tahun sebelumnya Rp80 miliar.

"Jika 130.000 jiwa yang dinonaktifkan itu tidak diambil alih pusat, kami harus menabahkan anggaran Rp50 miliar. Meski pendapatan daerah meningkat, angka itu sangat berat bagi APBD," jelasnya. Ketiga, Bantuan Sosial (Bansos) dinilai relatif aman dan tersalurkan dengan baik.

Menanggapi hal itu, Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan, soal Sekolah Rakyat, ia menegaskan kepala daerah harus fokus bersinergi dengan pusat, mulai pelaksanaan hingga pengawasan. Untuk BPJS, Mensos menjelaskan bahwa 70.000 dari 130.000 yang dinonaktifkan sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Meski demikian, 72.000 jiwa diaktifkan kembali dengan kriteria layak.

Sementara, soal penonaktifkan ini untuk mendata ulang kriteria yang benar-benar layak mendapat bantuan pusat. "Yang tidak bertanggung pusat, silakan daerah mengambil alih. Data yang sudah ditanggung pusat jangan mendapat jatah dari daerah lagi," pungkask Mensos. (rus)

Kasus Korupsi Pengadaan Truk Sampah Kepala Kejari Loteng Terbitkan Sprindik Baru

Praya (Suara NTB) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) kini tengah fokus menyelesaikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang masih menjadi tunggakan. Salah satunya kasus dugaan korupsi pengadaan dump truck dan arm roll di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Loteng tahun 2021. Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru pun telah dikeluarkan Kepala Kejari Loteng.

Sprindik baru ini guna mempercepat penyelesaian dugaan korupsi pada proyek pengadaan barang senilai Rp5 miliar tersebut. "Sprindik (penanganan korupsi di DLH Loteng) sudah diperbaharui," ungkap Kepala Kejari Loteng Putri Ayu Wulandari melalui Kasi. Intelijen Alfa Dera, kepada Suara NTB, Selasa (28/4).

Ia mengatakan, penertiban Sprindik baru tersebut dilakukan untuk memudahkan proses koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB. Ini untuk mempercepat penanganan kasus tersebut yang kini juga ditangani oleh tim baru dibawa komandan Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Dimas Praja Subroto.

Proses penanganan perkara tersebut, jelasnya, sebenarnya sudah masuk tahap akhir. Dengan jumlah saksi yang sudah diminta keterangannya sejauh ini sebanyak 20 orang. Jaksia kini tinggal menunggu hasil audit kerugian negara oleh BPKP perwakilan NTB.

Permintaan audit sendiri sudah diajukan cukup lama. Namun sampai saat ini belum selesai dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTB. "Ya, kalau melihat waktu seharusnya proses audit kerugian negara sudah selesai. Untuk itu, jaksia akan terus berkoordinasi dengan tim BPKP agar proses penanganan kasus ini bisa cepat selesai," tegas Alfa Dera.

Dalam hal ini, pihaknya yakin BPKP Perwakilan NTB bakal bekerja secara profesional menghitung nilai kerugian negara dalam kasus tersebut. Dan, begitu nilai kerugian negaranya diketahui secara pasti, baru kemudian pihaknya akan menentukan siapa pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini.

"Mohon dukungan semua dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nilai kerugian keuangan negara akan segera keluar dari teman-teman BPKP perwakilan NTB," ujar mantan Kasi. Intelijen Kejari Depok ini. (kir)

Para Guru di Lobar Tuntut Kejelasan NIP PPPK Paruh Waktu

Giri Menang (Suara NTB) -

Para guru di Lombok Barat (Lobar) menuntut kejelasan NIP PPPK Paruh Waktu yang belum ada titik terangnya hingga saat ini. Mereka berencana hearing ke DPRD Lobar untuk meminta difasilitasi menyuarkan persoalan ini. Namun, sayangnya pertemuan itu batal.

Sekretaris Forum Guru Honor Negeri (FGHN) Kabupaten Lombok Barat, Umi Suryani, S.Pd., mengatakan, terdapat 11 orang guru yang belum mendapatkan NIP. "Kami baru kumpulkan dokumen dari tujuh orang," kata Umi, Selasa (28/4).

Pihaknya mengordinasikan untuk membantu terkait persoalan NIP mereka. Sebab jika tidak difasilitasi, khawatirnya mereka tak kunjung diurus.

Dari berkas surat pengumuman para guru ini, beberapa ditemukan kejanggalan penyebab mereka belum menerima NIP. Sebab, dari hasil konsultasi mereka ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar, disampaikan bahwa beberapa kerdandalan yang menyebabkan mereka belum keluar NIP. Di

antaranya belum linear dan belum ada penempatan.

"NIP tidak bisa keluar, karena tidak linear. Ada juga penempatan kosong (tidak ada penempatan) sementara di sekolah induk itu ada jampunya mengantar. Kan lucu," ungkapnya.

Para guru pun mempertanyakan dasar NIP mereka belum keluar. Mereka juga menuntut agar NIP segera keluar. Pihaknya bersama guru pun meminta hearing ke DPRD untuk memfasilitasi para guru ini bertemu dengan BKD pada Selasa (27/4). Namun, pertemuan tersebut tidak jadi sehingga akan dijadwalkan ulang dengan dewan. Pihaknya berharap agar para guru diterima oleh dewan agar persoalan ini ada titik terang dan jalan keluarnya.



PARUH WAKTU - Kalangan guru PPPK Paruh Waktu yang hearing terkait nasib mereka ke DPRD belum lama ini.

Sementara itu, Kepala BKD dan PSDM Lobar, Baiq Mustika Dwi Adni mengatakan, mengatakan sejauh ini 38 orang yang belum keluar NIP PPPK Paruh Waktu. Terkait tindak lanjut PPPK paruh waktu yang belum keluar NIP tersebut, pihaknya sudah mendapatkan surat jawaban resmi dari BKN. "Sisanya tinggal 38 orang belum terima NIP. Terkait hal ini, Kita sudah ada jawaban dari BKN. Kita arahkan ke

Kemenpan, dan kita tindak lanjut surat dari BKN itu ke Kemenpan," kata dia. Langkah ini diharapkan segera ditindaklanjuti dan dijawab oleh Kemenpan RB.

Mengenai kapan kepastian NIP PPPK Paruh Waktu ini bisa keluar, pihaknya dalam hal ini menunggu jawaban dari Kemenpan-RB. Hal ini karena pihaknya belum bisa memastikan karena berkaitan dengan instansi lain. (her)

LAPORAN PUBLIKASI PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL AMALI PERIODE DESEMBER 2025

Table with columns: NO., ASET, 31 Desember 2025, 31 Desember 2024. Includes sub-sections for ASET, LIABILITAS, and DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS.

Table with columns: No., POS, 31 Desember 2025, 31 Desember 2024. Includes sub-sections for LABA RUGI and RASIO KEUANGAN.

Table with columns: NO., URAIAN, 31 Desember 2025, 31 Desember 2024. Section: LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF.

Table with columns: No., JENIS RASIO, Nilai Rasio (%). Section: RASIO KEUANGAN.

Table with columns: NO., URAIAN, 31 Desember 2025, 31 Desember 2024. Section: LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN.

Table with columns: NO., POS, 31 Desember 2025, 31 Desember 2024. Section: LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI.

Table with columns: JENIS PENGHIMPUNAN DANA, Saldo Rata-Rata, Pendapatan yang Akan Dibagihasikan, Jumlah Bagi Hasil, Indikasi Rate Of Return. Section: LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL.

Table with columns: JENIS PENYALURAN DANA, Saldo Rata-Rata, Pendapatan yang Akan Dibagihasikan. Section: LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL.

Table with columns: NO., ASET, L, DPK, KL, D, M, Jumlah, L, DPK, KL, D, M, JUMLAH. Section: LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF.

Table with columns: ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS, PEMEGANG SAHAM, STATUS PEMEGANG, ULTIMATE SHAREHOLDERS. Section: LAPORAN INFORMASI LAINNYA.